

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta
- Bayu, Dwi Anggono, 2018, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Jember
- Darmawan, Deni., & Kunkun Nur Fauzi, 2013, *Sistem Informasi Manajemen*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Tim Penulis, 2018, *Road Map Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia 2018-2025*, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Jakarta
- Erman Rajaguguk, 1994, *Kontrak Dagang International dalam Praktek di Indonesia*, FH UI dan Eclips Project, Jakarta
- Feather, John dan Sturges, Paul, 2003, *International encyclopedia of information and library science*, Routledge, London
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta
- Joni, 2018, Muhammad, *Ayat-Ayat Perumahan Rakyat*, HUD Institute, Jakarta
- Kristanto, Andri, 2005, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Gava Media, Klaten
- Pawit M. Yusuf, Subekti, Priyo, 2010, *Teori & Praktik Penelusuran Informasi*, Information Retrieval, Jakarta
- Pendit, Putu Laxman, 2008, *Perpustakaan Digital dari A sampai Z*, Cita Karyakarsa Mandiri,, Jakarta
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2019, *Efektivikasi Huku dan Peranan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung

Soeranto, Dwito Akoro, *Perjalanan Lima Tahun Program Sejuta Rumah*, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum – Jakarta, 2020

B. Artikel Jurnal

Kurniati, Nia, 2014, “*Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia*”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1

Kurniati, Nia, 2014, “*Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia*”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1

Muhammad Ahmad, Saleh dan Widiarto, 2010, Joko, *Perumahan Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Pramono, Didik, 2015, *Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), JIAP Vol. 1, No.1

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Darwis, Abdi, *Hak Konsumen untuk Mendapat Perlindungan Hukum dalam Industri Perumahan Di Kota Tangerang*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satker Pembiayaan Perumahan 2018-2020, 2020, Satker Direktorat jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Hal 60

Tantio, Lawrence, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Perumahan Dikaitkan Dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Aston Karawaci Apartment)*, Tesis, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja, 2012, *Laporan Hasil Kunjungan Kerja Central Provident Fund (CPF) dan Housing Development Board (HDB) Singapura*, Kementerian Perumahan rakyat, Jakarta.

D. Makalah/Pidato

Budiman Sitinjak, Rolas, *Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Bidang Perumahan, Pidato*, Workshop DJPI Berkarya Konsumen Ceria, Yogyakarta

Nurul, Wajah Mujahid, *Perumahan dan Permukiman Urusan Siapa?*, Paparan, Sosialisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta

Putrawan, Sub Koordinator Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat DJPI, Kementerian PUPR, Wawancara

Slamet Budisusetyo, Dedy, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat DJPI, Kementerian PUPR, Wawancara

E. Artikel Majalah dan Koran

Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2016, *Makalah kebijakan pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Barat*

F. Internet

“Program Jokowi di Bidang Papan”, <http://perumahan.pu.go.id/ditpnp/assets/uploads/maisona/maisona1.pdf>, Volume 01-Tahun I

“Program Nasional Sejuta Rumah, Apa Keunggulannya?”, <https://www.cermati.com/artikel/program-nasional-sejuta-rumah-apa-keunggulannya>

Agus Supriyono dalam Tesis Sri Rumani, 2002, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f97ae8a02d47/pemerintah-perbarui-regulasi-jdih/>

Anggun Yanibella Butar Butar, Jeanne, *Penggunaan Teknologi Video Conference Dalam Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas*, diakses melalui <https://setkab.go.id/penggunaan-teknologi-video-conference-dalam-penyelenggaraan-sidang-kabinet-rapat-terbatas/>



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KEEFEKTIVAN PENYEBARAN INFORMASI HUKUM OLEH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT: STUDI KASUS RUSUNAMI BANDAR KEMAYORAN
YUDHISTIRA ADI N, IGAM Wardana, S.H., LL.M., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Workshop Pembiayaan Perumahan di Kota Manado, <https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1482>

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Workshop Pembiayaan Perumahan di Kota Manado, <https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1482>

<https://bri.co.id/kprs-bri>

<https://ppdpp.id/realisasi-dashboard/>,

<https://www.btn.co.id/id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/Kredit-Konsumer/Pinjaman-Bangunan/KPR-BTN-Subsidi>

<https://www.btn.co.id/id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/Kredit-Konsumer/Pinjaman-Bangunan/KPR-BTN-Subsidi>

<https://www.btn.co.id/id/Tata-Kelola>

Hukum Online, Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH: Perbedaan kemampuan membangun sistem dokumentasi di tiap lembaga menjadi kendala

JDIH Badan Siber dan Sandi Negara, *Sekilas JDIH: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sarana Mewujudkan Insan Sadar Hukum di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara*, <https://jdih.bssn.go.id/sekilas-jdih>

JDIH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, <https://jdih.pu.go.id>,

Jimly Asshiddiqie Dalam Ahmad M. Rarnli, "Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Dalam Meningkatkan Akses Informasi Hukum Dan Pentingnya Etika Berinternet", melalui perpustakaan.bphn.go.id/index.php/

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/brosur>

Kompu Penyediaan Perumahan, *Data Perumahan BPS Harus Dijadikan Acuan*, <https://www.pu.go.id/berita/view/12606/data-perumahan-bps-harus-dijadikan-acuan>

Pengertian Brosur, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-brosur/#ftoc-heading-3>

RY, Skim Baru Pembiayaan Perumahan Dalam Mewujudkan Program Sejuta Rumah, <https://ppdpp.id/skim-baru-pembiayaan-perumahan-dalam-mewujudkan-program-sejuta-rumah/>

Sulaiman SH, MH., 2016, *Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/68/62>

Sulaiman, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)*, September, Hal. 4, (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jd/article/download/1479/1604>)



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KEEFEKTIVAN PENYEBARAN INFORMASI HUKUM OLEH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT: STUDI KASUS RUSUNAMI BANDAR KEMAYORAN
YUDHISTIRA ADI N, IGAM Wardana, S.H., LL.M., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Tesano, SH, *Hirarkitas Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan ditinjau dari Undang-Undang 12 Tahun 2011*, <https://media.neliti.com/media/publications/209793-hirarkhisitas-kedudukan-peraturan-menter.pdf>

Tim Penulis, *Analisa Penyebaran Informasi Melalui Brosur, Makalah*, diakses melalui <https://www.scribd.com/doc/315473187/Analisa-Penyebaran-Informasi-Melalui-Brosur>

G. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)

Peraturan Menteri Nomor 31/PRT/M/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1528)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1302)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1667)

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 11/MOU/Dp/2020, 33/MOU/DIR/2020 tentang Penyaluran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.